ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Ilmiati Iztihar
145020401111022

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

Nama	:	Ilmiati Iztihar
NIM	:	145020401111022
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22Januari 2018.

Malang, Januari 2018

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA.
NIP. 19550815 198403 1 002

ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN PEREKONOMIAN DI INDOESIA

Ilmiati Iztihar, Khusnul Ashar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: ilmiati71@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijadikan sarana kebijakan pembangunan nasional. Keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan perekonomian nasional. Akan tetapi, salah satu masalah yang menghambat perkembangan UMKM adalah kekurangan askes permodalan. Pemerintah menciptakan beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan utama setiap kebijakan pemerintah diarahkna untuk menghilangkan masalah-masalah pokok yang masih fundamental yakni: masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dilihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM serta meningkatknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi, memberikan pengaruh negatif signifikan pada kemiskinan.

Kata kunci: Peran UMKM, KUR, kemiskinan, PDRB

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank*, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, presentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2006-2016 tetapi masih dalam level yang lambat. Walaupun kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tetapi secara jumlah absolut penduduk miskin di Indonesia masih mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi juga masih menjadi masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dikaitkan dengan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang nantinya diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro:2006). Tiga macam ukuran dalam menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan *output*, pertumbuhan *output* per kapita, dan pertumbuhan *output* per pekerja. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan output per pekerja digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing di wilayah tersebut dan dilihat melalui pertumbuhan produktivitas.

UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti ketika krisis melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 UMKM yang pada masa itu masih disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena mampu memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Ravik, 2007). Mengingat UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional (Widyaresti, 2012). Saat krisis ekonomi, usaha kecil menengah terbukti mampu menampung 99,45 persen dari total

tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja (Bank Indonesia, 2015). Kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM) pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerja.

Selain dilihat dari kemampuan UMKM dalam menampung jumlah tenaga kerja yang banyak, kuantitas UMKM yang banyak di Indonesia juga menjadi alasan mengapa UMKM kebal terhadap krisis. UMKM menjadi usaha yang dapat bertahan dalam kondisi krisis disebabkan oleh sifat UMKM yang sangat fleksibel. Usaha yang fleksibel diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis. Kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan seperti pergeseran selera konsumen, *trend*, produk baru dan lain sebaginya cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

Hyland *et al* (2000) mengemukakan bahwa usaha kecil kebanyakan tidak memiliki strategi atau kekurangan ahli strategi. Hal ini yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Kinerja UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama dan mendasar yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), aspek keuangan, aspek teknis produksi dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga sosial masyarakat (LSM). Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan dan memperluas UMKM dalam perekonomian nasional diperlukan serangkaian pembinaan yang bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi, dan terbatasnya akses permodalan.

Melihat berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi oleh UMKM, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjamin dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Dalam inpres tersebut dijelaskan bahwa jaminan KUR sebesar 70 persen ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank pelaksana.

Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan serta modal manusia dan modal sosial kaum miskin. Salah satu contoh, pentingnya upaya untuk membantu orang miskin dalam memulai usaha kecil (mikro) yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang berpotensi memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi merupakan unit usaha paling banyak di Indonesia. Diharapkan nantinya program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu penopang dalam modal UMKM.

Dari permasalahan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kemiskinan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai "Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia".

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Semara Putra (2013), KUR yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi Pemberian. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah: (1) mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), (2) meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan, (3) sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.KUR menurut Kusmuljono (2009) adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif

yang akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin. UMKM harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.Dari definisi-definisi KUR dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang usahanya layak untuk mendapatkan bantuan kredit atau pembiayaan dari kreditur. Sasaran KUR adalah koperasi dan UMKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan. Tujuan akhir program KUR adalah meningkatkan perekonomian, mempercepat pengembangan sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.
Adapun aturan yang terkait KUR adalah:

1. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjamin.
2. Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.KEP-05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi.

Teori Lingkaran Kemiskinan (Nurkse)

Dalam Teori Lingkaran Kemiskinan (Nurkse) dijelaskan bahwa kemiskinan dapat bermula dalam kondisi apapun baik itu karena adanya ketimpangan, produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah ataupun tingkat tabungan dan investasi yang rendah. Dalam penelitian ini kemiskinan diasumsikan dimulai karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang pada akhirnya berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran kemiskinan, Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini, Nurkse mengatakan inti dari lingkaran kemiskinan ini adalah keadan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak, pembentukan modal ditentukan oleh tabungan dan di pihak lain ditentukan oleh perangsang untuk menanam modal.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harord-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capitalstock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro : 2009). Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses *learning by doing*, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Usaha Kecil

Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembeliansurplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepadaunit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga (*price risk*) karena adanya informasi asymetric antara pemilik dana (*household/net savers*) dengan perusahaan pengguna dana (*corporations /netborrowers*) sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Saunders, 2008). Lebih lanjut, Saunders (2008) mengemukakan bahwa fungsi dan

peranan intermediasi keuangan yaitu: (1) *function as broker*, (2) *function as asset transformers*, (3) *roleas delegated monitor*, (4) *role as information producer*.

Adanya intermediasi perbankan akan mempermudah akses permodalan bagi pihak kekurangan dana. Masyarakat yang kekurangan dana dapat memperoleh akses modal dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Dengan adanya kredit ini maka akan membuat produktivitas sebuah usaha menjadi meningkat, selain itu dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha yang mana dapat berimbas pada perluasan lapangan kerja dan pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja serta meningkatkan *output* yang dihasilkan oleh usaha tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif yang akan memaparkan tentang pengaruh penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), penganggulangan kemiskinan dan perekonomian di Indonesia. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menampilkan data dalam bentuk angka daripada naratif serta mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Pembahasan akan mengacu pada hasil pengolahan data yang diperoleh, kemudian data yang ditemukan akan dipaparkan secara sistematis dan faktual sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupadata dari 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2016 yang diperoleh dari situs resmi Bank Indoensia, Badan Pusat Statistik dan Kementrian Bidang Perekonomian Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu KUR, sedangkan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin, jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, nilai *output* UMKM dan PDRB.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data yang menggunakan model-model matematis, statistik, dan ekonometrik. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu uraian. Peneliti menggunakan analisis regresi data panel untuk mengolah hasil penelitian tersebut. Regresi data panel adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi memberikan beberapa keuntungan, yaitu mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y1_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$
$$Y2_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$
$$Y3_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$
$$Y4_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$
$$Y5_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

X_{it} = Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)
Y_{1it}= Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
Y_{2it}= Jumlah UMKM (unit)
Y_{3it} = Jumlah Tenaga Kerja UMKM (orang)
Y_{4it} = Nilai *Output* UMKM (Rupiah)
Y_{5it}= PDRB (Rupiah)
α = Konstanta
eit = Error term

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, pelaksanaan program KUR terus menunjukkan peningkatan. Pada periode 2008 - September 2014, jumlah bank yang ikut berpartisipasi dalam program ini berkembang dari 6 bank nasional menjadi 33 bank yang terdiri dari 7 bank nasional dan 26 Bank Pemerintah Daerah (BPD). Pada periode yang sama pula jumlah debitur KUR meningkat hampir 5 kali lipat dari yang awalnya 2,3 juta menjadi 11,3 juta orang. Sementara itu, realisasi kredit yang disalurkan melalui KUR juga meningkat hampir 4,5 kali lipat dari Rp11,5 triliun menjadi Rp50,3 triluin. Dengan demikian, sampai September 2014 secara kumulatif jumlah dana yang berhasil disalurkan melalui program KUR mencapai angka Rp168,3 triliun.

Realisasi penyaluran KUR tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan target penyalurannya. Pada periode 2010–September 2014, realisasi penyaluran tumbuh dengan rata-rata 30,7 persen per tahun, sedangkan targetnya hanya tumbuh dengan rata-rata 16,6 persen per tahun. Tidak mengherankan jika realisasi penyaluran KUR, khususnya sejak 2011, selalu melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan indikasi bahwa permintaan terhadap KUR dari UMKM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diasumsikan pemerintah.KUR Tahun 2007 - 2014 diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil karena dengan kucuran anggaran Pemerintah sebesar Rp. 16,7 triliun, yaitu Rp. 11,7 triliun untuk PMN dan Rp. 5,02 triliun untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP), telah berhasil memancing dana bank sebesar Rp 178,85 triliun untuk disalurkan kepada UMKM dengan NPL rata-rata sebesar 3,3%. Indikator keberhasilan lainnya yaitu program KUR telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang (Sumber: Komite Kebijakan KUR).

Menurut alokasi dananya, mayoritas pinjaman KUR lebih banyak tersalur untuk sektor perdagangan. Persepsi perbankan bahwa sektor perdagangan memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi penyebab mengapa KUR cenderung bias terhadap sektor ini. Bagi perbankan, pendapatan harian tetap pelaku usaha sektor perdagangan diartikan bahwa mereka memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman KUR tepat waktu dan tepat jumlah.Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena beberapa alasan. Pertama, sektor-sektor itu memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas. Kedua, *backward* dan *forward linkage* sektor-sektor tersebut terhadap sektor ekonomi lainnya sangat tinggi. Ketiga, khusus untuk sektor industri, berkembangnya sektor ini memungkinkan Indonesia menikmati secara optimal proses nilai tambah di dalam negeri.

Dalam konteks percepatan pengurangan kemiskinan, berkembangnya sektor-sektor di atas juga menjadi sangat krusial. Sektor pertanian termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kantong dari konsentrasi orang miskin. Lebih dari itu, studi yang dilakukan Adam (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan industri memiliki kemampuan menekan angka kemiskinan masing-masing 4 dan 6,5 kali lebih kuat dibandingkan dengan sektor *non-tradable*, termasuk perdagangan.Karena strategisnya posisi sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, muncul keinginan kuat dari Komite Kebijakan KUR untuk memperbesar porsi KUR bagi sektor-sektor tersebut. Maka sejak 2010, besarnya penjaminan untuk sektor itu dinaikkan menjadi 80 persen. Sayangnya, proporsi KUR untuk sektor-sektor tersebut tidak mengalami perubahan signifikan.Dilihat dari sebaran geografisnya, KUR masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sampai dengan September 2014, dari total plafon penyaluran KUR sebesar Rp168,3 triliun, 52,9 persennya tersalur hanya ke UMKM di enam provinsi di Pulau Jawa. Dari total debitur 11,9 juta orang, 61,8 persennya bertempat tinggal di Pulau Jawa.

Kartika (2011) menemukan bahwa ketersediaan lembaga keuangan di suatu daerah (desa) berkorelasi tinggi dengan akses terhadap KUR di daerah (desa) yang bersangkutan. Semua provinsi di Pulau Jawa memiliki ketersediaan lembaga keuangan (bank) yang memadai. Sebaliknya, banyak provinsi di luar Pulau Jawa, contohnya Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang ketersediaan lembaga keuangannya masih terbatas. Mengacu pada studi Kartika (2011) terlepas dari fakta bahwa secara agregat UMKM di Pulau Jawa relatif lebih banyak dibandingkan UMKM di luar Jawa, terbatasnya lembaga keuangan, seperti unit dan cabang bank pelaksana di beberapa provinsi luar Pulau Jawa kemungkinan juga berkontribusi terhadap tidak terdistribusinya KUR secara proporsional ke seluruh provinsi. Misalnya, dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, BRI hanya memiliki cabang di Ternate dan Soa-Sio. Terbatasnya unit dan cabang bank pelaksana ini membuat UMKM di beberapa provinsi, seperti di Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Tenggara, kesulitan mengakses KUR. Kenyataan ini perlu menjadi bahan pertimbangan karena UMKM di provinsi luar Jawa cenderung memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya dan karakter lokal yang lebih kental dibandingkan dengan UMKM di Jawa (Adam, 2009). Penggunaan sumber daya dan karakter lokal ini menjamin keuntungan dari proses nilai tambah bisa secara optimal dinikmati bangsa ini.

Dengan asumsi jumlah kategori UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable* sebanyak 16,6 juta (Kemenko Ekonomi, 2014), rasio jumlah debitur KUR terhadap jumlah UMKM kategori itu baru mencapai angka 68 persen. Rasio itu menunjukkan bahwa tantangan sekaligus peluang program KUR di masa mendatang adalah meningkatkan jangkauannya untuk melayani UMKM yang sudah *feasible* tetapi belum mendapatkan akses ke program ini. Tantangan dan peluang peningkatan jangkauan juga terbuka lebar karena sebagian usaha mikro dari total jumlah 38,2 juta boleh jadi akan naik peringkat dari kategori belum *feasible* dan belum bankable menjadi kategori *feasible* tetapi belum *bankable.*

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Pengaruh KUR Terhadap Kemiskinan

Tabel 1.**Hasil regresi data panel variabel KUR dan jumlah penduduk miskin**

Variabel (Y_1)	**Variabel (X)**	***Prob***	***Coefficient***	**Keterangan**
Jumlah Penduduk Miskin	Konstanta	0.000	5.483	Signifikan
	KUR	0.049	0.041	Signifikan
	Fixed Effect		***Coefficient***	
	Aceh		0.677228	
	Sumatera Utara		1.166390	
	Sumatera Barat		-0.195700	
	Riau		0.177172	
	Jambi		-0.377530	
	Sumatera Selatan		0.927043	
	Bengkulu		-0.267238	
	Lampung		0.941973	
	Bangka Belitung		-1.800759	
	Kepulauan Riau		-1.230145	
	DKI Jakarta		-0.132578	
	Jawa Barat		2.216989	
	Jawa Tengah		2.253681	
	DIYogyakarta		0.140729	
	Jawa Timur		2.302955	
	Banten		0.426510	
	Bali		-0.821305	
	Nusa Tenggara Barat		0.612443	
	Nusa Tenggara Timur		0.943905	
	Kalimantan Barat		-0.079277	
	Kalimantan Tengah		-1.076364	
	Kalimantan Selatan		-0.835841	
	Kalimantan Timur		-0.654203	
	Kalimantan Utara		-2.184192	
	Sulawesi Utara		-0.717476	
	Sulawesi Tengah		-0.054743	
	Sulawesi Selatan		0.596526	
	Sulawesi Tenggara		-0.259801	
	Gorontalo		-0.712643	
	Sulawesi Barat		-0.995326	
	Maluku		-0.239633	
	Maluku Utara		-1.630885	
	Papua Barat		-0.594263	
	Papua		0.748299	

Sumber: Data diolah, 2017

Pengaruh KUR Terhadap Jumlah UMKM

Tabel 2. **Hasil regresi data panel variabel KUR dan jumlah UMKM**

Variabel (Y_2)	**Variabel (X)**	***Prob***	***Coefficient***	**Keterangan**
Jumlah UMKM	Konstanta	0.000	-4.515	Signifikan
	KUR	0.000	1.074	Signifikan
	Fixed Effect		***Coefficient***	
	Aceh		0.600108	
	Sumatera Utara		0.911251	
	Sumatera Barat		0.621280	
	Riau		-0.822863	
	Jambi		-0.427839	
	Sumatera Selatan		0.466954	
	Bengkulu		-1.229074	
	Lampung		0.931220	
	Bangka Belitung		-1.629757	
	Kepulauan Riau		-1.268853	
	DKI Jakarta		0.026526	
	Jawa Barat		2.706476	
	Jawa Tengah		3.330743	
	DIYogyakarta		0.642011	
	Jawa Timur		3.074687	
	Banten		0.867848	
	Bali		1.090789	
	Nusa Tenggara Barat		0.968270	
	Nusa Tenggara Timur		0.873013	
	Kalimantan Barat		0.060544	
	Kalimantan Tengah		-0.877985	
	Kalimantan Selatan		0.525793	
	Kalimantan Timur		-0.812991	
	Kalimantan Utara		-3.646377	
	Sulawesi Utara		-0.076392	
	Sulawesi Tengah		-0.259499	
	Sulawesi Selatan		1.133495	
	Sulawesi Tenggara		0.412214	
	Gorontalo		-0.805360	
	Sulawesi Barat		-0.719773	
	Maluku		-0.390718	
	Maluku Utara		-1.781958	
	Papua Barat		-2.993247	
	Papua		-1.500538	

Sumber: Data diolah, 2017

Pengaruh KUR Terhadap Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Tabel 3. **Hasil regresi data panel variabel KUR dan jumlah tenaga kerja UMKM**

Variabel (Y_3)	**Variabel (X)**	***Prob***	***Coefficient***	**Keterangan**
Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Konstanta	0.000	-5.076	Signifikan
	KUR	0.000	1.172	Signifikan
	Fixed Effect		***Coefficient***	
	Aceh		0.313740	
	Sumatera Utara		1.198558	
	Sumatera Barat		0.644745	
	Riau		-0.796359	
	Jambi		-0.494540	
	Sumatera Selatan		0.519196	

Variabel (Y_3)	Variabel (X)	*Prob*	*Coefficient*	Keterangan
	Bengkulu		-1.400446	
	Lampung		1.100394	
	Bangka Belitung		-1.921074	
	Kepulauan Riau		-1.845400	
	DKI Jakarta		0.908834	
	Jawa Barat		3.376105	
	Jawa Tengah		3.976033	
	DIYogyakarta		0.734695	
	Jawa Timur		3.645688	
	Banten		0.840849	
	Bali		1.278224	
	Nusa Tenggara Barat		1.155986	
	Nusa Tenggara Timur		0.553433	
	Kalimantan Barat		-0.187881	
	Kalimantan Tengah		-1.111180	
	Kalimantan Selatan		0.310637	
	Kalimantan Timur		-0.784033	
	Kalimantan Utara		-4.007576	
	Sulawesi Utara		-0.486855	
	Sulawesi Tengah		-0.415018	
	Sulawesi Selatan		1.331900	
	Sulawesi Tenggara		0.223672	
	Gorontalo		-1.231787	
	Sulawesi Barat		-1.259267	
	Maluku		-1.079971	
	Maluku Utara		-2.675102	
	Papua Barat		-3.480773	
	Papua		-1.607144	

Sumber: Data diolah, 2017

Pengaruh KUR Terhadap Nilai *Output* UMKM

Tabel 4.**Hasil regresi data panel variabel KUR dan nilai output UMKM**

Variabel (Y_4)	Variabel (X)	*Prob*	*Coefficient*	Keterangan
Nilai Output UMKM	Konstanta	0.011	-1.820	Signifikan
	KUR	0.000	1.226	Signifikan
	Fixed Effect		***Coefficient***	
	Aceh		0.002624	
	Sumatera Utara		0.822701	
	Sumatera Barat		0.638060	
	Riau		-0.792725	
	Jambi		-0.303108	
	Sumatera Selatan		0.346217	
	Bengkulu		-0.996561	
	Lampung		0.859644	
	Bangka Belitung		-1.191194	
	Kepulauan Riau		-1.061867	
	DKI Jakarta		1.118235	
	Jawa Barat		2.709751	
	Jawa Tengah		2.599352	
	DIYogyakarta		0.566377	
	Jawa Timur		2.597820	
	Banten		0.841190	
	Bali		0.922429	

Variabel (Y_4)	Variabel (X)	*Prob*	*Coefficient*	Keterangan
	Nusa Tenggara Barat		1.059412	
	Nusa Tenggara Timur		-0.230812	
	Kalimantan Barat		-0.023167	
	Kalimantan Tengah		-0.733432	
	Kalimantan Selatan		0.225452	
	Kalimantan Timur		-0.180584	
	Kalimantan Utara		-2.372726	
	Sulawesi Utara		-0.306689	
	Sulawesi Tengah		-0.286183	
	Sulawesi Selatan		1.176941	
	Sulawesi Tenggara		0.026929	
	Gorontalo		-1.138852	
	Sulawesi Barat		-0.843629	
	Maluku		-0.915903	
	Maluku Utara		-1.988218	
	Papua Barat		-2.432241	
	Papua		-0.715241	

Sumber: Data diolah, 2017

Pengaruh KUR Terhadap PDRB

Tabel 5.**Hasil regresi data panel variabel KUR dan PDRB**

Variabel (Y_5)	Variabel (X)	*Prob*	*Coefficient*	Keterangan
PDRB	Konstanta	0.000	7.168	Signifikan
	KUR	0.000	0.820	Signifikan
	Fixed Effect		***Coefficient***	
	Aceh		-0.136685	
	Sumatera Utara		1.081525	
	Sumatera Barat		0.008179	
	Riau		1.195101	
	Jambi		-0.047640	
	Sumatera Selatan		0.627900	
	Bengkulu		-1.168670	
	Lampung		0.348268	
	Bangka Belitung		-0.927761	
	Kepulauan Riau		0.326549	
	DKI Jakarta		2.304555	
	Jawa Barat		1.956929	
	Jawa Tengah		1.506594	
	DIYogyakarta		-0.497756	
	Jawa Timur		2.027068	
	Banten		0.997756	
	Bali		-0.124504	
	Nusa Tenggara Barat		-0.465174	
	Nusa Tenggara Timur		-0.817227	
	Kalimantan Barat		-0.117796	
	Kalimantan Tengah		-0.468525	
	Kalimantan Selatan		-0.187874	
	Kalimantan Timur		1.209948	
	Kalimantan Utara		-0.626528	
	Sulawesi Utara		-0.547313	
	Sulawesi Tengah		-0.436790	
	Sulawesi Selatan		0.487053	
	Sulawesi Tenggara		-0.557953	

Variabel (Y_5)	Variabel (X)	*Prob*	*Coefficient*	Keterangan
	Gorontalo		-1.647520	
	Sulawesi Barat		-1.477436	
	Maluku		-1.509910	
	Maluku Utara		-1.619614	
	Papua Barat		-0.751634	
	Papua		0.056884	

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil UjiKoefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. **Nilai Koefisien Determinasi (R^2)**

Variabel (X)	Variabel (Y)	R-Squared	Adj. R-Squared	Keterangan
KUR	Jumlah Penduduk Miskin (Y_1)	0.665	0.661	Cukup besar
	Jumlah UMKM (Y_2)	0.703	0.700	Cukup besar
	Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Y_3)	0.749	0.747	Cukup besar
	Nilai *Output* UMKM (Y_4)	0.859	0.858	Besar
	PDRB (Y_5)	0.633	0.629	Cukup besar

Sumber: Data diolah, 2017

Pada analisis regresi, besarnya koefisien determinasi diukur melalui nilai R^2. Nilai R^2 berada pada interval 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien determinasi (R^2) semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen.

D. PEMBAHASAN

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Peran KUR sendiri berguna untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari penduduk miskin adalah para pelaku usaha yang masih kekurangan modal. Maka dari itu, KUR dianggap dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara KUR dan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut berarti bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori lingarakan kemiskinan (Nurkse) dengan hasil penelitian atau dengan kata lain hasil dari penelitian ini menolak teori tersebut. Teori lingkaran kemiskinan mengatakan bahwa dengan adanya dana (KUR) dapat mengurangi tingkat kemiskinan tetapi hal ini bertolak belakang dengan hasil penenlitian dimana jika ada kenaikan KUR sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan tetap mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Dapat disimpulkan bahwa pada kenyataanya program KUR tersebut kurang tepat sasaran karena meskipun penyaluran KUR mengalami peningkatan, hal tersebut tidak menjamin jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan.

Keberhasilan program KUR dalam memberdayakan UMKM belum berjalan linier dengan kemampuannya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Penyebabnya, secara konseptual KUR dikategorikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pasif (*passive poverty reduction program*). Artinya, desain program KUR tidak menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai sasaran utama penerima KUR (*targeted recipient*). Di sisi lain, hanya sebagian kecil KUR terdistribusi ke wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) dan masih rendahnya alokasi KUR pada sektor pertanian. Padahal kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah IBT dan secara sektoral proporsi penduduk miskin juga cenderung berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian.

Selain itu, dalam menjalankan program KUR, bank pelaksana tetap terikat dan harus mengikuti aturan-aturan *microprudential* perbankan, seperti NPL, LDR, CAR, dan GWM. Dalam kondisi yang demikian, cukup beralasan jika bank pelaksana lebih suka menyalurkan KUR kepada UMKM yang prospektif dan dipandang mampu mengembalikan pinjaman—yang pada umumnya dimiliki rumah tangga tidak miskin (P2E LIPI, 2012). Sebaliknya, menyalurkan KUR ke UMKM milik RTM (Rumah Tangga Miskin) dipandang akan meningkatkan risiko bank melanggar prinsip-prinsip *microprudential*, seperti naiknya NPL.

Permasalahan pada tataran konsep dan implementasi membuat RTM pemilik UMKM yang bisa mengakses program KUR memang masih sangat terbatas. Akan tetapi, mengandalkan program KUR untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak sepenuhnya salah karena memiliki basis empiris yang cukup kuat. Studi (P2E LIPI, 2012) menunjukkan terdapat korelasi yang kuat antara tinggi rendahnya kredit UMKM dengan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di satu provinsi. Semakin rendah KUR di daerah Papua maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kemiskinannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang potensial dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat struktur ekspor. UMKM juga memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. UMKM menghasilkan produk yang kemudian dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menegah bawah.Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebesar 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penyaluran dana KUR berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM. Dalam kurun waktu 2007 – 2014, realisasi penyaluran KUR selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan terhadap jumlah KUR yang disalurkan akan membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan unit usaha juga akan menyebabkan bertambahnya tenaga kerja, berarti kedua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya *output* per unit usaha maupun *output* per tenaga kerja.

Program KUR dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM sehingga dapat dijadikan kendaraan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan pelaku usaha UMKM, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan studi (TNP2K, 2014) kinerja UMKM setelah menerima KUR menunjukkan bahwa UMKM mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan kepemilikan aset bisnis. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa KUR memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan UMKM.Semakin jelas bahwa penyaluran KUR memberikan peran yang besar terhadap perkembangan UMKM, karena untuk mendapatkan nilai output yang besar, sebuah usaha membutuhkan biaya yang besar dan biaya tersebut bisa didapatkan melalui dana KUR. Sama seperti penelitian sebelumnya oleh Daniel Kadju (2012) dimana pada salah satu hipotesisnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara KUR terhadap petumbuhan UMKM. Pada hasil penelitian tersebut juga disebutkan bahwa KUR mempunyai tingkat efektivitas sebesar 82.4 persen dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pemasaran dan peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran dari kenaikan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi selama satu tahun. Modal (KUR) akan menstimulus pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan demikian usaha sektor riil bisa meningkatkan kegiatan produksi, hal tersebut berarti bahwa akan ada peningkatan nilai tambah, nilai tambah inilah yang nantinya akan menjadi komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan PDRB di Indonesia. Dalam perekonomian memang dana sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan sebuah usaha. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi sehingga dapat memperkuat pondasi dalam sebuah usaha.

Akses permodalan memang masih menjadi masalah utama bagi keberlangsungan sebuah usaha. Dalam hal ini, UMKM yang telah mendominasi sebagian besar usaha di Indonesia juga memerlukan biaya untuk melakukan proses produksi. Karena memang jumlah unit usahanya juga cukup banyak sehingga mampu menyerap sebagian tenaga kerja yang akan meningkatkan pendapatan per kapita yang diterima dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Seperti pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ersa (2015) mengenai pengaruh kredit UMKM

terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hasilnya menjelaskan bahwa peningkatan kredit untuk UMKM akan mengakibatkan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi.

KUR yang ditujukan untuk UMKM akan meningkatkan pendapatan per kapita para pelaku usaha yang pada akhirnya akan memberikan dampak kenaikan jumlah PDRB. UMKM selalu digambarkan sebagai usaha yang berperan penting dalam peningkatan dan berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Besarnya kontribusi KUR kepada UMKM akan menimbulkan multiplier effect dalam menciptakan PDRB, dimana telah ditunjukkan dalam hasil penelitian ini yaitu ketika terjadi peningkatan KUR maka akan mengakibatkan jumlah UMKM bertambah dan dapat meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB itu sendiri.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta berdasarkan hasil olah data dengan regresi data panel ditemukan butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa program KUR masih dirasa belum tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan karena desain program KUR tidak menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai sasaran utama penerima KUR (*targeted recipient*).
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat efektif dalam membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang terbukti dari bertambahnya jumlah UMKM.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat efektif dalam membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang terbukti dari bertambahnya jumlah tenaga kerja UMKM.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM karena kredit yang telah disalurkan sangat efektif dalam membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang terbukti dari bertambahnya nilai *output* UMKM.
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Hal tersebut berarti bahwa kredit KUR yang disalurkan efektif memberikan kontribusi pada meningkatkan PDRB sehingga pada akhirnya akan memberikan *mulltiplier effect* pada perekonomian di Indonesia.

Saran

1. Diharapkan pihak bank terus memberikan saluran dana KUR kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan lebih baik lagi apabila dana KUR yang disalurkan menyasar pada pelaku usaha yang baru agar jumlah UMKM semakin bertambah. Karena terbukti bahwa dana KUR memberikan pengaruh pada meningkatnya kinerja UMKM baik dari sisi *output* jumlah unit UMKM maupun penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan PDRB.
2. Diharapkan program pemerintah khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikaji ulang agar sasaran untuk menanggulangi kemiskinan bisa tercapai. Karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa mengandalkan program KUR saja, tetapi secara tidak langsung program KUR dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk miskin di UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. 2010. "The Role of SMEs in the Indonesia Industrialization." *Economic and Finance in Indonesia.* 45 (1): 15-30.

Adam, L. 2009. *The Economic Role of Interfirm Networks in the Development of SM*. Lambert Academic Publishing. Herstellung.

Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. EKONISIA.
Bank Indonesia. 2015. *Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* : Bank Indonesia.
Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
Daniel, Kadju. 2012. Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
Departemen Kementrian Perekonomian dan UMKM. 2007. *Kebijakan KUR*. Indonesia.
Ersa, R.S. 2015. Pengaruh Penyaluran Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi.* Universitas Brawijaya.
Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hyland, J. 2000. 'Small business and enterprise development: questions about research methodologhy', *Journal of Enterpreneurial Behaviour and Research*, 5 (1), 5-18.
James, K. dan Akrasanee, N. 1988. *Small and Medium Business Improvement in The Asean Region.* Institute of Southeast Asian Studies.
Karsidi, Ravik. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro*. Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor Vol.3, No.2, Edisi September 2007 (ISSN: 1858-2664).
Kartika, Sari. 2011. *Program KUR sebagai Alat Pendorong Perkembangan UMKM di Indonesia*. Jakarta: TNP2K.
Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi. 2014. Kendala dan Tantangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Paper yang dipresentasikan di *Nasional Workshop Menegenai KUR*, Jakarta, 25 November.
Kusmuljono, B.S. 2009. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*. Bogor : IPB Press.
Kuznets, Simon. 2008. *Economics Growth of Nations*. Cambridge: Harvard University Press.
Mudrajad Kuncoro. 2004. *"Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang".* Jakarta: Penerbit Erlangga.
Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.
Putra, Semara, I.G. 2013. Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Skripsi*: Bali. Universitas Udayana.
P2E LIPI. 2012. *KUR di Era Otonomi Daerah: Membangun Sinergi antara Kelembagaan Pasar, Pemerintah Daerah dan Komunitas dalam Pengelolaan Kredit Program untuk Pemberdayaan UMKM*. Jakarta : P2E-LIPI.
Rintuh, C.. M,. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta. Dikti.
Rose, Peter S., Hudgins, Sylvia C. 2010. *Bank Management & Financial Services,* McGraw-HillInternational Edition, New York.
Sari, Ayuditya Widha Kurnia. 2013. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Boyolali. *Skripsi.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Saunders, Antony, Garnett M. Millon. 2008. *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*, Sixth Edition, Mc Graw-Hill International Edition, New York.
Tim Nasional Percepatan *Penanggulangan Kemiskinan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).*http://www.tnp2k.go.id. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
TNP2K. 2014. *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans.* Jakarta: TNP2K.
TNP2K. 2013. *Kredit Usaha Rakyat Untuk Sektor Prioritas*. Jakarta: TNP2K.
Todaro, dan Smith. 2006. Development Economic. New York. Printice Hill.
Todaro, dan Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta: Erlangga.
Widyaresti, Enggar Pradipta dan Achma Hendra Setiawan. 2012. Analisis Peran BRI Unit Ketandan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi Pengusaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Diponegoro Journal of Economics* 1 (1) : 1-11.
World Bank. 2004. *Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta. The World Bank.
———————— . Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
———————— . Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009 tentang " Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
———————— . Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tentang "Tata cara pelaksanaan imbal jasa penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
———————— . Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang " Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".